

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial sebagai leading sector dalam penanggulangan kemiskinan dengan tanggung jawab besar dalam menangani masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di indonesia. Karakteristik penduduk miskin menurut Kementrian Sosial dikelompokkan menjadi kelompok fakir miskin dan kelompok miskin. Kelompok fakir adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan kelompok miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Melihat luasnya cakupan permasalahan kemiskinan ini, sudah selayaknya pemerintah mengajak para stakeholders lainnya yaitu swasta (perbankan, perusahaan), masyarakat (organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat) dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Data BPS Tahun 2017, menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di indonesia sebanyak 27,77 Juta Jiwa dari total penduduk. Secara fundamental permasalahan ini muncul dari aspek internal yaitu kesenjangan antar daerah, antar sektor dan kesenjangan antar

manusia/golongan. Sedangkan faktor eksternal berupa tantangan meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas. Implikasi terhadap masalah tersebut adalah munculnya pengangguran, kemiskinan dan ketertinggalan bagi sekelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan. *Pertama*, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. kebijakan ini berupa program-program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Keluarga Miskin. Klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). *Kedua*, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Karakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat program adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Contohnya adalah KUBE.

Ketiga adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristik kebijakan ini berupa program yang memberikan bantuan modal skala mikro, memperkuat kemandirian usaha dan meningkatkan manajemen usaha. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut telah membuahkan hasil, namun belum optimal. Data statistik menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan berkisar 1 – 1,5 % setiap tahunnya. Fakta tersebut tidak berbanding lurus dengan besarnya alokasi anggaran program penanggulangan kemiskinan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Purwanto (2012: 13) menyatakan bahwa selama ini lebih banyak program atau kebijakan yang gagal dilaksanakan daripada yang berhasil dilaksanakan, bahkan para ahli menyatakan bahwa implementasi yang berhasil hanyalah sebuah kebetulan (by chance), sementara kebijakan yang gagal dalam implementasi merupakan by design. Sehingga, perlambatan yang terjadi tersebut sangat mungkin disebabkan oleh banyaknya kendala dalam Implementasi program penanggulangan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Program penyaluran penanggulangan kemiskinan masyarakat desa merupakan program nasional yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial RI. Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (cash transfer) kepada Keluarga Miskin penerima bantuan. Kementerian sosial sebagai bagian dari lembaga yang berfokus pada Program

Pembangunan Kesejahteraan Sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mememberdayakan dan menanggulangi kelompok masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan fenomena Global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ketahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat sering dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia. Dari seminar ke simposium, dari lokakarya ke semiloka, dari model top down ke model bottom-up, dan variasinya program intervensi, pada akhirnya tetap menyisakan persoalan seperti tidak mampu menekan drastis angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Program penanggulangan kemiskinan di masyarakat desa hadir untuk melaksanakan amanah program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui pemberdayaan sosial yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera di tangani. Upaya menanggulangi kemiskinan merupakan usaha yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan itu sendiri sangat dinamis, masalah kemiskinan dipandang bukan suatu hal yang terjadi dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat dari suatu kebijakan.

Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti ; pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Pedoman bantuan langsung sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di masyarakat desa lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri.

Sejak dikeluarkannya peraturan Undang-undang No 11 tahun 2013 penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk untuk memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator keterbatasan sering ditunjukan oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang terdiri dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Tingkat kesejahteraan penduduk juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terbentuk dalam komunitas,

yang memberikan karakteristik berbedah antara wilayah satu dengan yang lainnya (Baharoglu dan Kessides,2001: 145). Tidak salah apabila perekonomian indonesia merupakan bahasan pembangunan ekonomi di indonesia dalam kaitan dengan aspek ekonomi maka aspek sosial juga mendapat perhatin, khususnya perspektif sosial dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh sebagian besar bangsa indonesia namun kenyataannya belumlah demikian.

Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak melakukan berbagai cara untuk mengurangi masalah kemiskinan, berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan akan tetapi masih saja kemiskinan belum berkurang. Masalah ini yang membuat pemerintah terus berputar otak untuk mengurangi kemiskinan di NTT. Menurut kajian yang dilakukan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam skala kebijakan, konsep, implementasi dan partisipasi. Keadaan Penduduk Desa Tutubhada Menurut Usia Dan Jenis Kelamin, Berdasarkan data demografi Desa Rendu Tutubhada jumlah penduduk Desa Rendu Tutubhada sebanyak 876 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 423 jiwa, dan perempuan sebanyak 453 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 164 KK.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Rendu Tutubhada paling banyak berada pada 19-49 tahun dengan rincian laki-laki 140 jiwa, dan perempuan 159 jiwa. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian Pada umumnya masyarakat desa tersebut bermata pencarian sebagai petani. Dari data monografi Desa tahun 2016 diketahui 505 orang penduduk menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi, tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju sementara itu, muncul kendala dari masyarakat itu sendiri terkait dengan pola pikir, perilaku dan budaya yang tidak mendukung perubahan. Tantangan utamanya adalah sikap mental yang tidak mau berubah. Pembangunan pola pikir dan sikap mental itu merupakan salah satu langkah sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perlu menjadi pendekatan utama dengan mengutamakan unsur produktif yang tepat sasaran dan spesifik yang salah satunya bisa dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang diintegrasikan untuk menuju masyarakat yang semakin sejahtera juga perlu didukung dari berbagai pihak terutama dukungan dari pimpinan daerah, pemerintah dan organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat di nagkeo.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN KEGIATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA MELALUI BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL PADA DESA TUTUBHADA KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan peneliti pada lokasi penelitian dan sesuai dengan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Implementasi bantuan langsung Pemberdayaan social Melalui program penanggulangan kemiskinan Masyarakat Desa Tutubhada Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo ”?.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi program penyaluran kegiatan penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui bantuan langsung pemberdayaan social pada desa tutubhada kecamatan aesesa selatan kabupaten nagekeo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai program penanggulangan kemiskinan yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan juga ddinas sosial yang ssesuai dengan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2008. Maka dari itu, penelitian ini dapat memberikan penjelsan mengenai penanggulangan kemiskinan yang baik yang telah diatur sesuai dengan UU yang di buat oleh pemerintah kabupaten.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh wawasan lebih mengenai program penanggulangan kemiskinan dan juga semangat masyarakat untuk membangun pola pikir, sikap mental dan sikap kemandirian yang harus terus dilakukan guna mengurangi kemiskinan yang semakin meningkat dari tahun ketahun.

b. Manfaat bagi pemerintah kabupaten nagekeo

Penelitian ini memberikan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dengan program yang diberikan oleh pemerintah kota.

Program ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini dilakukan agar dapat membantu mengurangi masyarakat miskin.

c. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu sedikit membantu meringankan beban yang telah dirasakan oleh masyarakat miskin untuk saat ini. Program ini dibuat guna menanggulangi kemiskinan yang saat ini semakin marak di negekeo.